

Pembiaran sebagai jalan tengah: analisis studi kasus agensi dan kepengaturan terminal bayangan bus AKAP di Kabupaten Klaten = Omission as the middle ground: analysis on the case of agency and governmentality in AKAP's "Terminal bayangan, Klaten Regency

Kurniawan Eka Prayudha, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20512637&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini menyajikan kepengaturan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Klaten sebagai Street level bureaucracy mengenai keberadaan terminal bayangan yang telah beroperasi sejak lama. Berbagai kepengaturan yang coba dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Klaten untuk menghilangkan aktivitas terminal bayangan seperti mengedarkan surat larangan kegiatan terminal bayangan, razia berupa penilangan bus AKAP yang menaikkan penumpang di terminal bayangan, dan pembangunan terminal tipe A Ir Soekarno sebagai terminal resmi untuk penjualan tiket dan menaikkan serta menurunkan calon penumpang. Namun, kepengaturan yang coba dilakukan untuk memusatkan titik pemberangkatan angkutan bus AKAP hanya pada satu tempat yaitu terminal Ir Soekarno malah menimbulkan konflik antara pihak Dishub dan Terminal Ir Soekarno dengan pihak agen penjual tiket. Konflik yang dipicu oleh surat edaran Dirjen dianggap menyengsarakan pihak agen yang berjualan pada terminal bayangan, sebagai birokrat jalanan, pihak Dishub berupaya untuk meredam konflik yang terjadi antara pihak Dishub, terminal Ir Soekarno dengan agen penjual tiket dengan cara negosiasi yang pada akhirnya menghasilkan pembiaran.

<hr>

This paper present the case of governmentality done by Klaten Districts Government as Street Level Bureaucracy regarding the existence of terminal bayangan that have been operating for a long time. The government have taken various steps to prevent the activity of terminal bayangan but the governmentality applied to centralize the departure point of trans-city busses resulted in conflict. This conflict between the Department of Transportation as well as Ir. Soekarno Terminal with the ticketing agent started by the circular letter (surat edaran) that was said to torment the live of ticketing agents that operate in the terminal bayangan. A few people who are part of the department of transportation act as a street level bureaucrats, helping the negotiations between their institution, Ir. Soekarno Terminal, and the ticketing agent that resulted in omission.